

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Jambi City Government in addressing the social problems of street children and to identify the supporting and inhibiting factors in the coordination among government agencies in implementing street children management programs. This research employs a descriptive qualitative method, using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The results show that the Jambi City Government, through the Social Services Department and the Department of Women's Empowerment and Child Protection (DPMPPA), has implemented various programs, including sheltering, social rehabilitation, family reunification, and skills training. Supporting factors in government coordination include the existence of formal regulations, political commitment, and support from the community and the private sector. Meanwhile, inhibiting factors include weak integration between programs, limited human resources, and suboptimal monitoring and evaluation systems. Based on the approach of the Kampus Diakoneia Modern Foundation (KDM), it is recommended that the handling of street children should be holistic, sustainable, and rights-based to achieve effective and lasting outcomes.

Keywords: *Government Role, Street Children, Social Handling, Government Coordination, Jambi City*

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Jambi dalam penanggulangan masalah sosial anak jalanan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat koordinasi antarinstansi pemerintah dalam pelaksanaan program penanganan anak jalanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi, melalui Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA), telah menjalankan berbagai program seperti penampungan, rehabilitasi sosial, reunifikasi keluarga, dan pelatihan keterampilan. Faktor pendukung dalam koordinasi pemerintah meliputi adanya regulasi formal, komitmen politik, dan dukungan dari masyarakat serta dunia usaha. Adapun faktor penghambatnya adalah lemahnya integrasi antarprogram, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurang optimalnya sistem monitoring dan evaluasi. Berdasarkan pendekatan Yayasan Kampus Diakoneia Modern (KDM), disarankan agar penanganan anak jalanan dilakukan secara holistik, berkelanjutan, dan berbasis pada hak anak untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Anak Jalanan, Penanganan Sosial, Koordinasi Pemerintah, Kota Jambi